



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1650, 2017

BNPT. Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip
Dinamis.

PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengelolaan arsip dinamis, akses arsip, dan perlindungan terhadap keamanan arsip serta untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berhak, perlu diatur dalam suatu Peraturan Badan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;

9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor PER-01/K.BNPT/I/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 397);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip yang dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
3. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
4. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
5. Akses Arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
6. Klasifikasi adalah proses identifikasi kategori-kategori kegiatan dan arsip dinamis yang dihasilkan dan mengelompokkannya.

7. Klasifikasi Keamanan Arsip adalah kategori kerahasiaan informasi arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkannya terhadap kepentingan dan keamanan negara, masyarakat dan perorangan.
8. Klasifikasi Akses Arsip adalah kategori pembatasan akses terhadap arsip berdasarkan kewenangan penggunaan arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.
9. Pengamanan Arsip adalah program perlindungan fisik dan informasi arsip berdasarkan klasifikasi keamanannya.
10. Biasa/Terbuka adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh orang banyak tidak merugikan siapapun.
11. Terbatas adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
12. Rahasia adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro. Apabila informasi yang terdapat pada arsip bersifat sensitif bagi lembaga/organisasi akan menimbulkan kerugian yang serius terhadap *privacy*, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.
13. Sangat Rahasia adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa.
14. Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang apabila dibuka atau diketahui orang lain dapat menimbulkan konsekuensi setelah dipertimbangkan secara seksama bahwa dengan menutup informasi dapat

melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya.

15. Penggunaan Arsip adalah kegiatan penyediaan dan pemanfaatan arsip bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak.
16. Pengguna Internal adalah setiap orang atau unit kerja yang menggunakan arsip dan berasal dari lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
17. Pengguna Eksternal adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan arsip dan berasal dari luar lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
18. Prosedur Pengaksesan Informasi Publik adalah tata cara atau aturan ketersediaan informasi sesuai kewenangan hukum dan otorisasi legal pemanfaatan informasi publik.
19. Kepala adalah pejabat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang mengkoordinir di bidang penanggulangan terorisme.
20. Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyediaan dan/atau pelayanan informasi di badan publik yang ditunjuk oleh Kepala.
21. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang selanjutnya disingkat BNPT adalah lembaga penanggulangan terorisme berbentuk lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang penanggulangan terorisme yang berkedudukan di ibukota negara.

Pasal 2

- (1) Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan BNPT, dimaksudkan untuk:
 - a. mendorong unit kerja agar memberkaskan Arsip Dinamis unit kerjanya secara tertib yang disertai dengan daftar arsip aktifnya;
 - b. memberikan petunjuk kepada unit kerja agar dapat mengamankan dan mematuhi kewenangan akses

- terhadap Klasifikasi informasi Arsip yang telah ditetapkan;
- c. melindungi fisik dan informasi arsip dari kerusakan dan kehilangan sehingga ketersediaan, keterbacaan, keutuhan, otentisitas, dan realibilitas arsip dapat tetap terjaga; dan
 - d. melindungi arsip dari pengaksesan yang tidak sesuai dengan aturan sehingga dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah.
- (2) Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan BNPT, bertujuan untuk:
- a. menjadi acuan pelaksanaan dalam pengelolaan arsip dinamis di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
 - b. menyediakan layanan informasi arsip dinamis kepada publik dengan prinsip cepat, tepat, murah, dan aman;
 - c. tersedianya informasi mengenai penanggulangan terorisme yang dikategorikan terbuka dan dapat diakses secara luas bagi publik sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - d. terjaminnya keamanan arsip bagi informasi yang dikecualikan; dan
 - e. terciptanya kenyamanan bekerja bagi seluruh pegawai di lingkungan BNPT.

Pasal 3

Ruang lingkup Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip di lingkungan BNPT, mencakup:

- a. klasifikasi keamanan arsip, memuat informasi biasa/terbuka, terbatas dan rahasia;
- b. pengamanan arsip, memuat pengamanan ruang simpan, penentuan pengelola arsip, serta daftar informasi terbatas, rahasia; dan

- c. klasifikasi dan pengaturan akses arsip, memuat pengguna internal dan pengguna eksternal.

Pasal 4

- (1) Asas Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan BNPT dilaksanakan dengan menerapkan asas gabungan.
- (2) Asas gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sentralisasi dalam penetapan kebijakan dan desentralisasi dalam pelaksanaan di lapangan.
- (3) Penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyusunan dan penerapan pedoman serta standar operasional prosedur, sumber daya manusia, sarana, dan prasarana.

Pasal 5

Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip di BNPT diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. arsip yang tercipta di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dapat diklasifikasikan menjadi informasi biasa/terbuka, terbatas, dan rahasia;
- b. ketiga tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berbeda dalam teknis pengamanannya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin tinggi pula tingkat pengamanannya;
- c. setiap pegawai BNPT hanya dapat mengakses arsip yang berada pada tanggung jawab tugas dan kewenangannya; dan
- d. publik dapat mengakses informasi BNPT yang dikategorikan biasa/terbuka sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Pasal 6

- (1) Arsip Dinamis di lingkungan BNPT dapat diakses oleh pengguna secara internal dan eksternal.

- (2) Pengguna Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. Kepala sebagai pimpinan tingkat tertinggi, dapat mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya;
 - b. Sekretaris Utama dan Deputi sebagai pimpinan tingkat tinggi, dapat mengakses arsip di bawah kewenangannya, tapi tidak dapat mengakses informasi yang terdapat pada pimpinan level tertinggi dan yang satu level dengan unit di luar unit kerjanya, kecuali telah mendapatkan izin;
 - c. Staf Ahli, sebagai pimpinan tingkat tinggi, dapat mengakses seluruh arsip sesuai dengan bidangnya setelah mendapatkan izin dari pimpinan tinggi yang terkait;
 - d. Pejabat Eselon II dan Pejabat Eselon III, sebagai pimpinan tingkat menengah, dapat mengakses seluruh arsip dibawah kewenangannya, namun tidak dapat mengakses informasi yang terdapat pada pimpinan level tertinggi dan yang satu level diluar unit kerjanya, kecuali telah mendapatkan izin;
 - e. Pejabat Eselon IV, Arsiparis, dan Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagai pejabat pelaksana, hanya dapat mengakses seluruh arsip yang berada pada tanggung jawab, tugas dan kewenangannya, dengan tingkat klasifikasi biasa; dan
 - f. Pengawas Internal mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip untuk melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- (3) Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. pengawas eksternal mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. aparat penegak hukum mempunyai hak untuk mengakses arsip pada pencipta arsip yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditanganinya untuk melaksanakan fungsi penegak hukum; dan
- c. publik dapat mengakses informasi BNPT yang dikategorikan terbuka sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan;

Pasal 7

- (1) Sarana Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan BNPT menggunakan sarana perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*).
- (2) Perangkat keras (*hardware*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sarana penyimpanan arsip konvensional berupa *filing cabinet*/rak arsip untuk menyimpan arsip biasa/ terbuka dan terbatas, dan brangkas atau lemari besi untuk arsip rahasia;
 - b. sarana penyimpanan arsip media baru berupa lemari arsip sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi; dan
 - c. prasarana berupa ruang penyimpanan yang representatif sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi.
- (3) Perangkat lunak (*software*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. daftar arsip aktif, inaktif, terjaga dan vital; dan
 - b. aplikasi pengelolaan arsip aktif dan inaktif.

Pasal 8

- (1) Pejabat fungsional arsiparis dan/atau pengelola arsip yang bertugas mengelola arsip harus dipilih pegawai yang profesional baik dalam substansi kearsipan maupun dalam dedikasi dan integritas.

- (2) Pejabat fungsional arsiparis dan/atau pengelola arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala BNPT.

Pasal 9

Arsip Dinamis BNPT terbagi menjadi 3 (tiga) kategori, meliputi:

- a. biasa/terbuka;
- b. terbatas; dan
- c. rahasia.

Pasal 10

Arsip Dinamis di lingkungan BNPT yang termasuk ke dalam kategori arsip biasa/terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, merupakan arsip yang tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja BNPT yaitu:

- a. Arsip Dinamis di lingkungan Sekretariat Utama meliputi Biro Perencanaan, Biro Perencanaan, Hukum dan Humas dan Biro Umum;
- b. Arsip Dinamis di lingkungan Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi meliputi Direktorat Pencegahan, Direktorat Perlindungan dan Direktorat Deradikalisasi;
- c. Arsip Dinamis di lingkungan Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan meliputi Direktorat Penindakan, Direktorat Pembinaan Kemampuan, dan Direktorat Penagakan Hukum;
- d. Arsip Dinamis di lingkungan Deputi Kerjasama Internasional meliputi Direktorat Kerjasama Bilateral, Direktorat Kerjasama Regional dan Multilateral, dan Direktorat Perangkat Hukum Internasional; dan
- e. Arsip Dinamis dari lingkungan Inspektorat.

Pasal 11

Arsip Dinamis di lingkungan BNPT yang termasuk ke dalam kategori Arsip Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan arsip yang dari segi bobot informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja unit teknis

di lingkungan BNPT, yang meliputi:

- a. Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi Bagian Kepegawaian seperti *personal file*, hasil pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), rekam medis pegawai;
- b. Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga seperti dokumen penggandaan barang/dokumen lelang BNPT;
- c. Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi Inspektorat seperti laporan hasil pemeriksaan auditor internal dan eksternal, laporan hasil pemeriksaan auditor independen;
- d. Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi Bagian Keuangan seperti berkas pengelolaan anggaran di unit kerja; dan
- e. Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi Bagian Arsip seperti daftar arsip vital dan daftar arsip terjaga.

Pasal 12

Arsip Dinamis di lingkungan BNPT yang termasuk ke dalam kategori Arsip Rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, mengandung dampak yang luas hingga mengganggu kinerja BNPT yang meliputi:

- a. Arsip Dinamis yang tercipta dari Unit Organisasi, Kepegawaian dan Organisasi, Hukum dan Hubungan Masyarakat seperti kasus/sengketa hukum, Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI), dan *personal file*;
- b. Arsip Dinamis yang tercipta dari Biro Umum seperti sertifikat tanah, rancang bangun instalasi telepon, instalasi listrik, daftar arsip vital, dan lain-lain;
- c. Arsip Dinamis yang tercipta dari Deputi Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi seperti data intelijensi Terorisme; dan
- d. Arsip Dinamis yang tercipta dari Inspektorat seperti data tindak lanjut hasil pengawasan.

Pasal 13

- (1) Pengamanan ruang simpan secara keseluruhan mencakup fasilitas pengamanan seperti pemasangan kamera pengawas, kunci pengamanan ruangan, dan media simpan.
- (2) Pengamanan arsip kategori biasa/terbuka disimpan pada rak besi, arsip kategori terbatas disimpan pada *filing cabinet* atau lemari besi dan arsip kategori rahasia disimpan pada lemari besi atau brankas.

Pasal 14

- (1) Penentuan pengelola arsip meliputi pejabat fungsional arsiparis dan atau penata arsip di masing-masing unit pengolah;
- (2) Arsiparis dan/atau penata arsip sebagai pengelola arsip aktif berperan dalam pengamanan arsip di unit pengolah (*central file*); dan
- (3) Arsiparis dan atau penata arsip sebagai pengelola arsip inaktif berperan dalam pengamanan arsip di pusat arsip (*record centre*) BNPT.

Pasal 15

- (1) Pengamanan informasi Arsip Dinamis di lingkungan BNPT meliputi penciptaan daftar arsip terbatas dan daftar arsip rahasia.
- (2) Tujuan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 merupakan acuan pembatasan akses yang digunakan oleh penyedia informasi yang berada di unit pengolah (*central file*) dan di unit kearsipan (*records centre*).

Pasal 16

Tabel klasifikasi keamanan dan pengamanan akses arsip dinamis di lingkungan BNPT terbagi atas fasilitatif dan substantif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 17

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 28 Juli 2017

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUHARDI ALIUS

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN BADAN NASIONAL
 PENANGGULANGAN TERORISME
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 3 TAHUN 2017
 TENTANG
 KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

TABEL KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	FASILITATIF				
I	KEPEGAWAIAN				
	00 Bezetting/Persediaan Pegawai	Terbatas	Kepala Biro Umum	memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi
	01 Formasi Pegawai				
	00 Usulan Unit Kerja	Terbatas	Kepala Biro Umum	memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi
	01 Usulan Formasi	Terbatas	Kepala Biro Umum	memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi

NO	JENIS DOKUMEN / ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	02	Usulan Permintaan Formasi kepada MenPan dan RB dan Kepka BKN	Terbatas	Kepala Biro Umum	memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi
	03	Persetujuan Menpan dan RB	Terbatas	Kepala Biro Umum	memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi
	04	Penetapan Formasi ASN	Terbatas	Kepala Biro Umum	memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi
	05	Penetapan Formasi Khusus	Terbatas	Kepala Biro Umum	memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi
	02	Pengadaan Pegawai				
	00	Proses Penerimaan Pegawai	Biasa	Kepala Bagian Kepegawaian dan Organisasi	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi
	01	Penetapan Pengumuman Kelulusan	Biasa	Kepala Bagian Kepegawaian dan Organisasi	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi
	02	Berkas Lamaran yang Tidak Diterima	Biasa	Kepala Bagian Kepegawaian dan Organisasi	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi

NO	JENIS DOKUMEN / ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
						dan Organisasi
	03	Nota Usul dan Kelengkapan Penetapan NIP	Biasa	Kepala Bagian Kepegawaian dan Organisasi	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi
	04	Nota Usul Pengangkatan CPNS/CASN menjadi ASN lebih dari 2 Tahun	Terbatas	Kepala Biro Umum	memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi
	05	SK CPNS/CASN dan ASN Kolektif	Terbatas	Kepala Biro Umum	memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi
	06	Prajabatan	Biasa	Kepala Bagian Kepegawaian dan Organisasi	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi
	07	SK CPNS/CASN dan ASN Kolektif	Biasa	Kepala Bagian Kepegawaian dan Organisasi	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi
	03	Pembinaan Karir Pegawai				
	00	Penilaian Prestasi Kerja	Terbatas	Kepala Biro Umum	memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi

NO	JENIS DOKUMEN / ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	01	Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	Terbatas	Kepala Biro Umum	memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi
	02	Pembinaan Mental	Terbatas	Kepala Biro Umum	memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi
	03	Hukuman Disiplin	Terbatas	Kepala Biro Umum	memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi
	04	Ujian Kenaikan Pangkat/Jabatan				
	00	Ujian Penyesuaian Ijazah	Terbatas	Kepala Biro Umum	memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi
	01	Ujian Dinas	Terbatas	Kepala Biro Umum	memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi
	05	Ujian Kompetensi				
	00	Assesment Test Pegawai	Terbatas	Kepala Biro Umum	memiliki dampak yang mengganggu tugas dan fungsi BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi

NO	JENIS DOKUMEN / ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	01	Pemetaan/ <i>Talent Mapping</i> Pegawai	Terbatas	Kepala Biro Umum	memiliki dampak yang mengganggu tugas dan fungsi BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi
	06	Penyelesaian Pengelolaan Keberatan Pegawai	Terbatas	Kepala Biro Umum	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi
	07	Penetapan Perubahan Data Dasar/Status/Kedudukan Hukum Pegawai	Terbatas	Kepala Biro Umum	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi
	08	Mutasi Pegawai				
	00	Kenaikan Pangkat/Golongan	Terbatas	Kepala Biro Umum	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi
	01	Kenaikan Gaji Berkala	Biasa	Kepala Bagian Kepegawaian dan Organisasi	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi
	02	Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi Antar Unit Kerja	Terbatas	Kepala Biro Umum	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi

NO	JENIS DOKUMEN / ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	03	Rotasi Kerja	Biasa	Kepala Bagian Kepegawaian dan Organisasi	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi
	04	Penyesuaian Masa Kerja	Biasa	Kepala Bagian Kepegawaian dan Organisasi	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi
	05	Penyesuaian Tunjangan Keluarga	Biasa	Kepala Bagian Kepegawaian dan Organisasi	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi
	06	Penyesuaian Kelas Jabatan	Biasa	Kepala Bagian Kepegawaian dan Organisasi	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi
	07	Mutasi Keluarga	Terbatas	Kepala Biro Umum	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi
	09	Pangangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Struktural				
	00	Pangangkatan Jabatan Struktural	Terbatas	Kepala Biro Umum	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi

NO	JENIS DOKUMEN / ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
		01 Pemberhentian Jabatan Struktural	Terbatas	Kepala Biro Umum	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi
	10	Pendelegasian Wewenang				
		00 Pelaksanaan Tugas (Plt)	Biasa	Kepala Bagian Kepegawaian dan Organisasi	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi
		01 Pelaksanaan Harian (Plh)	Biasa	Kepala Bagian Kepegawaian dan Organisasi	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi
	11	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai				
		00 Program Diploma	Biasa	Kepala Bagian Kepegawaian dan Organisasi	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi
		01 Program Sarjana	Biasa	Kepala Bagian Kepegawaian dan Organisasi	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi
		02 Program Pasca Sarjana	Biasa	Kepala Bagian Kepegawaian dan Organisasi	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi

NO	JENIS DOKUMEN / ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	03 Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan	Biasa	Kepala Bagian Kepegawaian dan Organisasi	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi	
	04 Kursus/Diklat Fungsional	Biasa	Kepala Bagian Kepegawaian dan Organisasi	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi	
	05 Kursus/Diklat Teknis	Biasa	Kepala Bagian Kepegawaian dan Organisasi	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi	
	06 Orientasi CPNS/CASN	Biasa	Kepala Bagian Kepegawaian dan Organisasi	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi	
	07 Berkas Baperjaket	Terbatas	Kepala Biro Umum	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi	
	12 Administrasi Pegawai					
	00 Data/Kepegawaian Pegawai	Terbatas	Kepala Biro Umum	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi	
	01 Kartu Pegawai	Biasa	Kepala Bagian Kepegawaian	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi	

NO	JENIS DOKUMEN / ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
				dan Organisasi		dan Organisasi
	02	Karis/Karsu	Biasa	Kepala Bagian Kepegawaian dan Organisasi	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi
	03	Kartu Taspen	Biasa	Kepala Bagian Kepegawaian dan Organisasi	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi
	04	Kartu Jaminan Kesehatan	Biasa	Kepala Bagian Kepegawaian dan Organisasi	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi
	05	Tanda Jasa	Biasa	Kepala Bagian Kepegawaian dan Organisasi	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi
	06	Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)	Biasa	Kepala Bagian Kepegawaian dan Organisasi	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi
	07	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	Terbatas	Kepala Biro Umum	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi

NO	JENIS DOKUMEN / ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	08 Tunjangan Kinerja dan Uang Makan	Biasa	Kepala Bagian Kepegawaian dan Organisasi	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi	
	09 Daftar Urut Kepangkatan (DUK)	Terbatas	Kepala Biro Umum	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi	
	13 Cuti Pegawai					
	00 Cuti Besar	Biasa	Kepala Bagian Kepegawaian dan Organisasi	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi	
	01 Cuti Tahunan	Biasa	Kepala Bagian Kepegawaian dan Organisasi	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi	
	02 Cuti Sakit	Biasa	Kepala Bagian Kepegawaian dan Organisasi	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi	
	03 Cuti Bersalin	Biasa	Kepala Bagian Kepegawaian dan Organisasi	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi	
	04 Cuti Alasan Penting	Biasa	Kepala Bagian Kepegawaian	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi	

NO	JENIS DOKUMEN / ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
				dan Organisasi		dan Organisasi
	05	Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN)	Biasa	Kepala Bagian Kepegawaian dan Organisasi	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi
	14	Pembinaan Jabatan Fungsional				
	00	Pengangkatan Jabatan Fungsional Tertentu	Terbatas	Kepala Biro Umum	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi
	01	Kenaikan Jenjang Jabatan dan Alih Jabatan	Terbatas	Kepala Biro Umum	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi
	02	Pemindahan Jabatan Fungsional Tertentu	Terbatas	Kepala Biro Umum	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi
	03	Pengangkatan Jabatan Fungsional Umum	Terbatas	Kepala Biro Umum	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi
	04	Pemindahan Jabatan Fungsional Umum	Terbatas	Kepala Biro Umum	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi

NO	JENIS DOKUMEN / ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	05	Pemberhentian Jabatan Fungsional	Terbatas	Kepala Biro Umum	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi
	15	Kesejahteraan Pegawai				
	00	Berkas tentang Layanan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai	Biasa	Kepala Bagian Kepegawaian dan Organisasi	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi
	01	Berkas tentang Layanan Asuransi Pegawai	Biasa	Kepala Bagian Kepegawaian dan Organisasi	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi
	02	Berkas tentang Layanan Tabungan Perumahan (Taparum)	Biasa	Kepala Bagian Kepegawaian dan Organisasi	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi
	03	Berkas Tentang Layanan Bantuan Sosial	Biasa	Kepala Bagian Kepegawaian dan Organisasi	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi
	04	Berkas tentang Pakaian Dinas	Biasa	Kepala Bagian Kepegawaian dan Organisasi	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi

NO	JENIS DOKUMEN / ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	05	Berkas tentang Layanan Pengurusan Jenazah	Biasa	Kepala Bagian Kepegawaian dan Organisasi	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi
	16	Pemberhentian Pegawai	Terbatas	Kepala Biro Umum	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi
	01	Pemberhentian dengan tidak hormat	Terbatas	Kepala Biro Umum	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi
	17	Perselisihan/Sengketa Kepegawaian	Terbatas	Kepala Biro Umum	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi
	18	Usul Pemberhentian dan Penetapan Pensiun Pegawai/Janda/Duda dan ASN yang meninggal	Biasa	Kepala Bagian Kepegawaian dan Organisasi	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi
	19	Organisasi Non Kedinasan	Biasa	Kepala Bagian Kepegawaian dan Organisasi	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi
	00	KORPRI	Biasa	Kepala Bagian Kepegawaian dan Organisasi	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi

NO	JENIS DOKUMEN / ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	01	Dharma Wanita	Biasa	Kepala Bagian Kepegawaian dan Organisasi	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi
	02	Koperasi	Biasa	Kepala Bagian Kepegawaian dan Organisasi	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi
	03	Yayasan	Biasa	Kepala Bagian Kepegawaian dan Organisasi	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi
	04	Asosiasi	Biasa	Kepala Bagian Kepegawaian dan Organisasi	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi
	05	Organisasi Lain-lain	Biasa	Kepala Bagian Kepegawaian dan Organisasi	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi
	20	Berkas Persorangan Pegawai				
	00	Berkas perseorangan PNS	Rahasia	Kepala Biro Umum	menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan serta merusak kemitraan dan	Bagian Kepegawaian dan Organisasi

NO	JENIS DOKUMEN / ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	(1)	(2)	(3)				
						reputasi	
		01 Non PNS		Rahasia	Kepala Biro Umum	menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan serta merusak kemitraan dan reputasi	Bagian Kepegawaian dan Organisasi
II	KU	KEUANGAN					
		00 Pelaksanaan Anggaran					
		00 Rencana Anggaran Biaya (RAB)		Biasa	Kepala Bagian Keuangan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Keuangan
		01 Penggajian		Biasa	Kepala Bagian Keuangan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Keuangan
		02 Pengeluaran Anggaran		Biasa	Kepala Bagian Keuangan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Keuangan
		03 Belanja Barang habis pakai		Biasa	Kepala Bagian Keuangan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Keuangan

NO	JENIS DOKUMEN / ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	04	Belanja Barang inventaris	Biasa	Kepala Bagian Keuangan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Keuangan
	05	Belanja Jasa	Biasa	Kepala Bagian Keuangan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Keuangan
	01	Pengelolaan Perbendaharaan				
	00	Perbendaharaan	Biasa	Kepala Bagian Keuangan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Keuangan
	01	Kartu Pengawasan Kredit	Terbatas	Kepala Biro Umum	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Bagian Keuangan
	02	Pajak	Terbatas	Kepala Biro Umum	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Bagian Keuangan
	03	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Terbatas	Kepala Biro Umum	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Bagian Keuangan
	04	Pengembalian Belanja	Biasa	Kepala Bagian Keuangan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Keuangan
	05	Berita Acara Pemeriksaan Kas	Terbatas	Kepala Biro Umum	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Bagian Keuangan

NO	JENIS DOKUMEN / ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	06	Tuntutan Ganti Rugi	Terbatas	Kepala Biro Umum	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Bagian Keuangan
	07	Pembukuan Anggaran	Terbatas	Kepala Biro Umum	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Bagian Keuangan
	02	Verifikasi Anggaran	Biasa	Kepala Bagian Keuangan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Kepegawaian
	03	Akutansi dan Pelaporan				
	00	Laporan Kas	Terbatas	Kepala Biro Umum	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Bagian Keuangan
	01	Laporan perkembangan realisasi penerimaan, realisasi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal	Terbatas	Kepala Biro Umum	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Bagian Keuangan
	02	Laporan Keuangan Tahunan	Terbatas	Kepala Biro Umum	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Bagian Keuangan
	04	Ketatausahaan Keuangan				
	00	Keterangan Penghasilan	Terbatas	Kepala Biro Umum	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Bagian Keuangan
	01	Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP)	Terbatas	Kepala Biro Umum	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Bagian Keuangan

NO	JENIS DOKUMEN / ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	02	Permohonan Pinjaman	Terbatas	Kepala Biro Umum	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Bagian Keuangan
	03	Iuran Keanggotaan Organisasi	Biasa	Kepala Bagian Keuangan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Keuangan
	05	Bantuan/Pinjaman Luar Negeri				
	00	Permohonan Pinjaman Luar Negeri (<i>Blue Book</i>)	Terbatas	Kepala Biro Umum	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Bagian Keuangan
	01	Dokumen kesanggupan negara donor untuk membiayai (<i>Grey book</i>)	Terbatas	Kepala Biro Umum	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Bagian Keuangan
	02	Dokumen <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU), dan dokumen sejenisnya	Terbatas	Kepala Biro Umum	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Bagian Keuangan
	03	Dokumen <i>Loan Agreement</i> Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) seperti : <i>draft agreement, legal opinion</i> , surat menyurat dengan tender	Terbatas	Kepala Biro Umum	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Bagian Keuangan
	04	Alokasi dan relokasi penggunaan dana luar negeri	Terbatas	Kepala Biro Umum	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Bagian Keuangan
	05	Aplikasi penarikan dana bantuan luar negeri (BLN)	Biasa	Kepala Bagian Keuangan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Keuangan

NO	JENIS DOKUMEN / ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	06 Otorisasi penarikan dana (<i>payment advice</i>)	Terbatas	Kepala Biro Umum	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Bagian Keuangan	
	07 Realisasi pencairan dana bantuan luar negeri, yaitu : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), SPM	Terbatas	Kepala Biro Umum	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Bagian Keuangan	
	08 Replenishment (permintaan penarikan dana dari negara donor) meliputi antara lain : <i>No Objection Letter (NOL), Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization (WA), Statement of Expenditure (SE)</i>	Terbatas	Kepala Biro Umum	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Bagian Keuangan	
	09 <i>Staff Appraisal Report</i>	Biasa	Kepala Bagian Keuangan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Keuangan	
	10 <i>Report / Laporan yang terdiri dari:Report / Laporan</i>	Biasa	Kepala Bagian Keuangan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Keuangan	
	11 Laporan Hutang Negara	Biasa	Kepala Bagian Keuangan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Keuangan	

NO	JENIS DOKUMEN / ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	12	<i>Completion Report/ Annual Report</i>	Biasa	Kepala Bagian Keuangan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Keuangan
	13	Ketentuan/peraturan yang menyangkut bantuan/pinjaman luar negeri	Biasa	Kepala Bagian Keuangan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Keuangan
	06	Pengelolaan APBN/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)				
	00	Keputusan Kepala BNPT tentang Penetapan	Terbatas	Kepala Biro Umum	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Bagian Keuangan
	07	Sistem Akuntansi Instansi (SAI)				
	00	Berita Acara Rekonsiliasi (BAR)	Terbatas	Kepala Biro Umum	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Bagian Keuangan
	01	Register Transaksi Harian (RTH), Dokumen Sumber (DS), Surat Tanda Setoran (STS), Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB), Surat Perintah Membayar (SPM)	Terbatas	Kepala Biro Umum	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Bagian Keuangan
	02	Laporan Realisasi Bulanan SAI/Triwulan/Semester	Biasa	Kepala Bagian Keuangan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Keuangan
	08	Pertanggungjawaban Keuangan Negara				

NO	JENIS DOKUMEN / ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	00 Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	Biasa	Kepala Bagian Keuangan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Keuangan	
	01 Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal oleh Inspektorat	Biasa	Kepala Bagian Keuangan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Keuangan	
	02 Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional	Biasa	Kepala Bagian Keuangan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Keuangan	
	03 Dokumen Penyelesaian Kerugian Keuangan Negara	Biasa	Kepala Bagian Keuangan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Keuangan	
III	PR PERENCANAAN					
	00 Perencanaan dan Strategi Pembangunan					
	00 Kebijakan dan Strategi Pembangunan	Biasa	Kepala Bagian Perencanaan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Perencanaan	
	01 Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)	Biasa	Kepala Bagian Perencanaan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Perencanaan	
	02 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)	Biasa	Kepala Bagian Perencanaan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Perencanaan	
	03 Rencana Kerja Pemerintah (RKP)	Biasa	Kepala Bagian Perencanaan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Perencanaan	

NO	JENIS DOKUMEN / ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	04	Rencana Strategis (Renstra) BNPT	Biasa	Kepala Bagian Perencanaan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Perencanaan
	05	Rencana Kerja (Renja K/L) BNPT	Biasa	Kepala Bagian Perencanaan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Perencanaan
	06	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) BNPT	Biasa	Kepala Bagian Perencanaan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Perencanaan
	07	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) BNPT Alokasi Anggaran	Biasa	Kepala Bagian Perencanaan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Perencanaan
	08	Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) BNPT dengan Komisi DPR - RI	Terbatas	Kepala Biro Perencanaan, Hukum dan Humas	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Bagian Perencanaan
	09	Risalah Rapat Dengar Pendapat dengan DPR - RI	Terbatas	Kepala Biro Perencanaan, Hukum dan Humas	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Bagian Perencanaan
	01	Program Kerja dan Anggaran				
	00	Usulan unit kerja beserta data pendukung	Biasa	Kepala Bagian Perencanaan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Perencanaan
	01	Program Kerja Tahunan Unit Kerja	Biasa	Kepala Bagian Perencanaan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Perencanaan
	02	Program Kerja Tahunan Lembaga/Instansi	Biasa	Kepala Bagian Perencanaan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Perencanaan

NO	JENIS DOKUMEN / ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
				Perencanaan	BNPT	
	03	Program Kerja New Inisiatif	Biasa	Kepala Bagian Perencanaan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Perencanaan
	02	Penetapan/Kontrak Kinerja				
		00 Kepala BNPT	Terbatas	Kepala Bagian Perencanaan	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Bagian Perencanaan
		01 Pimpinan unit kerja	Terbatas	Kepala Bagian Perencanaan	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Bagian Perencanaan
	03	Perencanaan Anggaran				
		00 Penyusunan Rencana Anggaran	Biasa	Kepala Bagian Perencanaan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Perencanaan
		01 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Biasa	Kepala Bagian Perencanaan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Perencanaan
		02 Standarisasi Harga Satuan Perencanaan Barang (SHSPB)	Biasa	Kepala Bagian Perencanaan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Perencanaan
		03 Standar Biaya Keluaran (SBK)	Biasa	Kepala Bagian Perencanaan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Perencanaan
	04	Revisi Dokumen Anggaran				

NO	JENIS DOKUMEN / ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	00	Revisi DIPA dan POK	Biasa	Kepala Bagian Perencanaan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Perencanaan
	01	Anggaran Belanja Tambahan (ABT)	Biasa	Kepala Bagian Perencanaan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Perencanaan
	02	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P)	Biasa	Kepala Bagian Perencanaan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Perencanaan
	05	Laporan				
	00	Laporan Berkala	Biasa	Kepala Bagian Data dan Pelaporan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Data dan Pelaporan
	01	LAKIP	Biasa	Kepala Bagian Data dan Pelaporan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Data dan Pelaporan
	02	Laporan Insidental	Terbatas	Kepala Biro Perencanaan, Hukum dan Humas	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Bagian Data dan Pelaporan
	06	Evaluasi Program				
	00	Evaluasi program unit kerja	Biasa	Kepala Bagian Data dan Pelaporan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Data dan Pelaporan

NO	JENIS DOKUMEN / ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	01	Evaluasi program BNPT	Biasa	Kepala Bagian Data dan Pelaporan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Data dan Pelaporan
IV	HK HUKUM					
	00	Program Legislasi				
	00	Bahan/materi program legislasi nasional dari instansi	Biasa	Kepala Bagian Hukum dan Humas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Hukum dan Humas
	01	Program Legislasi terkait Terorisme	Terbatas	Kepala Biro Perencanaan, Hukum dan Humas	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Bagian Hukum dan Humas
	01	Rancangan Peraturan PerUndang-Undangan				
	00	Rancangan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,	Terbatas	Kepala Biro Perencanaan, Hukum dan Humas	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Bagian Hukum dan Humas
	01	Rancangan Peraturan Pemerintah	Terbatas	Kepala Biro Perencanaan, Hukum dan Humas	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Bagian Hukum dan Humas

NO	JENIS DOKUMEN / ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	02 Rancangan Peraturan/Keputusan/Instruksi Presiden	Terbatas	Kepala Biro Perencanaan, Hukum dan Humas	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Bagian Hukum dan Humas	
	03 Peraturan Kepala BNPT	Terbatas	Kepala Biro Perencanaan, Hukum dan Humas	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Bagian Hukum dan Humas	
	04 Keputusan/Ketetapan Kepala BNPT	Terbatas	Kepala Biro Perencanaan, Hukum dan Humas	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Bagian Hukum dan Humas	
	05 Instruksi/Surat Edaran	Terbatas	Kepala Biro Perencanaan, Hukum dan Humas	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Bagian Hukum dan Humas	
	06 Keputusan/Ketetapan Kepala BNPT	Terbatas	Kepala Biro Perencanaan, Hukum dan Humas	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Bagian Hukum dan Humas	
	07 Standar/Pedoman/Prosedur Kerja/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis	Terbatas	Kepala Biro Perencanaan, Hukum dan	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Bagian Hukum dan Humas	

NO	JENIS DOKUMEN / ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
		yang bersifat nasional/regional/instansional		Humas		
	02	Nota Kesepahaman/ <i>Memorandum of Understanding/ (MoU)/ Kontrak/Perjanjian Kerja Sama</i>				
		00 Dalam Negeri	Terbatas	Kepala Biro Perencanaan, Hukum dan Humas	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Bagian Hukum dan Humas
		01 Luar Negeri	Terbatas	Kepala Biro Perencanaan, Hukum dan Humas	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Bagian Hukum dan Humas
	03	Dokumentasi Hukum				
		00 Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi Hukum	Biasa	Kepala Bagian Hukum dan Humas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Hukum dan Humas
		01 Sosialisasi/ Penyuluhan/ Pembinaan Hukum	Biasa	Kepala Bagian Hukum dan Humas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Hukum dan Humas
		02 Bantuan/Konsultasi Hukum/Advokasi	Biasa	Kepala Bagian Hukum dan Humas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Hukum dan Humas
	04	Kasus/Sengketa Hukum				

NO	JENIS DOKUMEN / ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	00	Pidana	Terbatas	Kepala Biro Perencanaan, Hukum dan Humas	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Bagian Hukum dan Humas
	01	Perdata	Terbatas	Kepala Biro Perencanaan, Hukum dan Humas	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Bagian Hukum dan Humas
	02	Tata Usaha Negara	Terbatas	Kepala Biro Perencanaan, Hukum dan Humas	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Bagian Hukum dan Humas
	05	Perizinan	Terbatas	Kepala Biro Perencanaan, Hukum dan Humas	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Bagian Hukum dan Humas
	06	Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI)				
	00	Hak Cipta	Terbatas	Kepala Biro Perencanaan, Hukum dan Humas	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Bagian Hukum dan Humas
	01	Hak Paten	Terbatas	Kepala Biro Perencanaan, Hukum dan Humas	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Bagian Hukum dan Humas

NO	JENIS DOKUMEN / ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	02 Hak Merek	Terbatas	Kepala Biro Perencanaan, Hukum dan Humas	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Bagian Hukum dan Humas	
	07 Telaah Hukum					
	00 Telaah Hukum Internal	Terbatas	Kepala Biro Perencanaan, Hukum dan Humas	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Bagian Hukum dan Humas	
	01 Telaah Hukum Eksternal	Terbatas	Kepala Biro Perencanaan, Hukum dan Humas	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Bagian Hukum dan Humas	
	02 Telaah Perjanjian	Terbatas	Kepala Biro Perencanaan, Hukum dan Humas	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Bagian Hukum dan Humas	
	03 Telaah Akta	Terbatas	Kepala Biro Perencanaan, Hukum dan Humas	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Bagian Hukum dan Humas	
	08 Penghargaan kelembagaan	Biasa	Kepala Bagian Hukum dan Humas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Hukum dan Humas	
V	OT	ORGANISASI DAN TATA LAKSANA				

NO	JENIS DOKUMEN / ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	00	Organisasi				
	00	Struktur Organisasi BNPT	Biasa	Kepala Bagian Kepegawaian dan Organisasi	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi
	01	Analisis Organisasi	Terbatas	Kepala Biro Umum	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi
	02	Evaluasi Organisasi	Terbatas	Kepala Biro Umum	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi
	01	Analisa Jabatan				
	00	Analisis Jabatan Struktural	Biasa	Kepala Bagian Kepegawaian dan Organisasi	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi
	01	Analisis Jabatan Fungsional Tertentu	Biasa	Kepala Bagian Kepegawaian dan Organisasi	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi
	02	Analisis Jabatan Fungsional Umum	Biasa	Kepala Bagian Kepegawaian dan Organisasi	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi
	02	Standar kompetensi				

NO	JENIS DOKUMEN / ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	00	Standar Kompetensi Jabatan Struktural	Biasa	Kepala Bagian Kepegawaian dan Organisasi	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi
	01	Standar Kompetensi Jabatan Fungsional	Biasa	Kepala Bagian Kepegawaian dan Organisasi	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi
	03	Analisis Beban Kerja	Biasa	Kepala Bagian Kepegawaian dan Organisasi	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi
	04	Tata Laksana				
	00	Penyusunan dan Penyelarasan Proses Bisnis	Biasa	Kepala Bagian Kepegawaian dan Organisasi	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi
	01	Evaluasi Proses Bisnis	Biasa	Kepala Bagian Kepegawaian dan Organisasi	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi
	02	Penyusunan dan Penyelenggaraan SOP AP	Biasa	Kepala Bagian Kepegawaian dan Organisasi	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi
	03	Monitoring Evaluasi SOP AP	Biasa	Kepala Bagian Kepegawaian dan Organisasi	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi

NO	JENIS DOKUMEN / ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	04	Reformasi Birokrasi	Biasa	Kepala Bagian Kepegawaian dan Organisasi	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi
	05	Evaluasi Jabatan	Biasa	Kepala Bagian Kepegawaian dan Organisasi	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Kepegawaian dan Organisasi
VI	KA PERSURATAN & KEARSIPAN					
	00	Administrasi Persuratan				
	00	Kartu Kendali	Biasa	Kepala Biro Umum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
	01	Buku Agenda	Biasa	Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
	02	Lembar Pengantar/Buku Ekspedisi/ Formulir/Catatan Permintaan dan Layanan Penggandaan Dokumen/Arsip	Biasa	Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
	03	Pengurusan Surat Masuk	Biasa	Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

NO	JENIS DOKUMEN / ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	04	Pengurusan Surat Keluar	Biasa	Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
	01	Pengelolaan Arsip Dinamis				
	00	Penyusunan Sistem	Biasa	Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
	01	Pembinaan	Biasa	Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
	02	Monitoring	Biasa	Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
	02	Pengelolaan Arsip In Aktif				
	00	Penataan, penyimpanan, pemeliharaan, pengolahan	Biasa	Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

NO	JENIS DOKUMEN / ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	01	Peminjaman Arsip	Biasa	Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
	03	Penyusutan Arsip	Biasa	Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
	00	Pemindahan Arsip Inaktif	Biasa	Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
	01	Pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna	Biasa	Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
	02	Penyerahan arsip statis	Biasa	Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
	04	Evaluasi Sistem Kearsipan	Biasa	Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

NO	JENIS DOKUMEN / ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
VIII	RT	KETATAUSAHAAN DAN RUMAH TANGGA				
		00 Fasilitas Kantor				
		00 Fasilitas Kendaraan Dinas	Biasa	Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
		01 Fasilitas gedung/ruang rapat/konsumsi	Biasa	Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
		02 Pemakaian Telepon, Internet, Listrik, PDAM	Biasa	Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
		03 Administrasi Pemeliharaan gedung dan taman	Biasa	Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
		04 Administrasi Pengelolaan sarana dan prasarana kantor	Biasa	Kepala Bagian Tata Usaha	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

NO	JENIS DOKUMEN / ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
				dan Rumah Tangga		
	05	Administrasi pengadaan outsourcing	Biasa	Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
	01	Perjalanan dinas :				
	00	Perjalanan dinas luar negeri	Biasa	Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
	01	Perjalanan dinas dalam negeri	Biasa	Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
	02	Ketertiban dan keamanan				
	00	Pengamanan, Penjagaan, Dan Pengawalan Terhadap Pejabat, Kantor, Dan Rumah Dinas	Biasa	Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

NO	JENIS DOKUMEN / ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	01	Pemantauan dan Pelaporan Ketertiban dan Keamanan	Biasa	Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
IX	PL	PERLENGKAPAN				
	00	Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa				
	00	Analisis kebutuhan Unit Kerja	Biasa	Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
	01	Tata ruang	Biasa	Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
	02	Daftar Perkenalan Mampu	Biasa	Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
	01	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa				

NO	JENIS DOKUMEN / ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	00 Barang Habis Pakai/ATK	Biasa	Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	
	01 Perlengkapan Kantor	Biasa	Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	
	02 Tanah dan Bangunan	Biasa	Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	
	03 Kendaraan	Biasa	Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	
	04 Telaahan pelaksanaan lelang/ pembelian/ penunjukan langsung	Biasa	Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	
	05 Dokumen lelang	Terbatas	Kepala Biro Umum	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	

NO	JENIS DOKUMEN / ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	06 Instalasi/Jaringan	Rahasia	Kepala Biro Umum	menimbulkan kerugian yang serius serta merusak kemitraan dan reputasi	Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	
	07 Peralatan Kearsipan	Biasa	Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	
	08 Jasa Profesi	Biasa	Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	
	09 Sewa Rumah Operasional/Sewa Apartement	Biasa	Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	
	10 Jasa Akomodasi	Biasa	Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	
	11 Jasa Lainnya	Biasa	Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	
	02 Penyimpanan barang dan distribusi					

NO	JENIS DOKUMEN / ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	00 Penyimpanan inventaris kekayaan Negara	Biasa	Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	
	01 Pendistribusian	Biasa	Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	
	03 Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)					
	01 Pembukuan BMN	Biasa	Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	
	02 Daftar barang ruangan	Biasa	Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	
	03 Inventarisasi BMN	Biasa	Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	

NO	JENIS DOKUMEN / ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	04 Penghapusan Barang Milik Negara	Biasa	Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	
	05 Pelaporan Barang Milik Negara	Biasa	Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	
	06 Sertifikasi Barang Milik Negara	Biasa	Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	
	04 Pemeliharaan/perawatan Barang Milik Negara	Biasa	Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	
X	HM KEHUMASAN					
	00 Administrasi Kegiatan Keprotokolan					
	00 Penyelenggaraan Acara Kedinasan	Biasa	Kepala Bagian Hukum dan Humas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Hukum dan Humas	

NO	JENIS DOKUMEN / ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	01	Kunjungan Dinas Dalam dan Luar Negeri	Biasa	Kepala Bagian Hukum dan Humas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Hukum dan Humas
	02	Agenda Pimpinan	Biasa	Kepala Bagian Hukum dan Humas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Hukum dan Humas
	03	Dokumen <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i> dan Kerjasama	Biasa	Kepala Bagian Hukum dan Humas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Hukum dan Humas
	04	Dokumentasi/liputan kegiatan dinas pimpinan dan acara kedinasan dalam bentuk video dan foto	Biasa	Kepala Bagian Hukum dan Humas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Hukum dan Humas
	01	Pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi kelembagaan	Biasa	Kepala Bagian Hukum dan Humas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Hukum dan Humas
	02	Hubungan antar Instansi Pemerintah				
	00	Hubungan Antar Lembaga Pemerintah	Biasa	Kepala Bagian Hukum dan Humas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Hukum dan Humas
	01	Hubungan Dengan Organisasi Sosial/LSM	Biasa	Kepala Bagian Hukum dan Humas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Hukum dan Humas
	02	Hubungan Dengan Perusahaan	Biasa	Kepala Bagian Hukum dan Humas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Hukum dan Humas

NO	JENIS DOKUMEN / ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	03	Hubungan Dengan Perguruan Tinggi/ Sekolah, Termasuk Magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/Praktek Kerja Lapangan (PKL)	Biasa	Kepala Bagian Hukum dan Humas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Hukum dan Humas
	04	Forum Kehumasan (Bakohumas/Perhumas)	Biasa	Kepala Bagian Hukum dan Humas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Hukum dan Humas
	05	Hubungan dengan Media Massa	Biasa	Kepala Bagian Hukum dan Humas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Hukum dan Humas
	03	Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR RI	Terbatas	Kepala Biro Perencanaan, Hukum dan Humas	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Bagian Hukum dan Humas
	04	Bahan/materi pidato/sidang MPR, DPR, DPD, kabinet, DPRD, Muspida Provinsi/Kabupaten/Kota	Terbatas	Kepala Biro Perencanaan Hukum dan Humas	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Bagian Hukum dan Humas
	05	Dokumentasi dan Penerbitan	Biasa	Kepala Bagian Hukum dan Humas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Hukum dan Humas
	06	Publikasi melalui media cetak maupun elektronik	Biasa	Kepala Bagian Hukum dan Humas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Hukum dan Humas

NO	JENIS DOKUMEN / ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
07	Pameran/sayembara/lomba, festival, pembuatan spanduk dan iklan	Biasa	Kepala Bagian Hukum dan Humas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Hukum dan Humas	
08	Penghargaan/Tanda Kenang-kenangan	Biasa	Kepala Bagian Hukum dan Humas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Hukum dan Humas	
09	Ucapan terima kasih, ucapan selamat, bela sungkawa, permohonan maaf	Biasa	Kepala Bagian Hukum dan Humas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Hukum dan Humas	
XI	LT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
00	Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan					
00	Administrasi penelitian dan pengembangan	Biasa	Kepala Sub Direktorat Pemberdayaan Masyarakat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Direktorat Pencegahan	
01	Hasil penelitian, pengkajian dan pengembangan	Biasa	Kepala Sub Direktorat Pemberdayaan Masyarakat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Direktorat Pencegahan	
02	Sosialisasi dan desiminasi hasil penelitian, pengkajian dan pengembangan	Biasa	Kepala Sub Direktorat Pemberdayaan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Direktorat Pencegahan	

NO	JENIS DOKUMEN / ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				Masyarakat		
	03	Bimbingan teknis penelitian, pengkajian dan pengembangan	Biasa	Kepala Sub Direktorat Pemberdayaan Masyarakat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Direktorat Pencegahan
	04	Forum komunikasi penelitian dan pengembangan	Biasa	Kepala Sub Direktorat Pemberdayaan Masyarakat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Direktorat Pencegahan
	05	Seminar, Lokakarya, Temukarya, Workshop	Biasa	Kepala Sub Direktorat Pemberdayaan Masyarakat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Direktorat Pencegahan
	01	Data dan informasi penelitian dan pengembangan				
	00	Data penelitian dan pengembangan	Biasa	Kepala Sub Direktorat Pemberdayaan Masyarakat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Direktorat Pencegahan
	01	Informasi statistik penelitian dan pengembangan	Biasa	Kepala Sub Direktorat Pemberdayaan Masyarakat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Direktorat Pencegahan
	02	Jurnal Hasil Penelitian/Pengkajian	Biasa	Kepala Sub Direktorat Pemberdayaan Masyarakat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Direktorat Pencegahan

NO	JENIS DOKUMEN / ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	02	Monitoring dan Evaluasi dan pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan	Biasa	Kepala Sub Direktorat Pemberdayaan Masyarakat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Direktorat Pencegahan
XIII	PERPUSTAKAAN					
	00	Penyimpanan Deposit Bahan Pustaka	Biasa	Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
	01	Pengolahan Deposit Bahan Pustaka	Biasa	Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
	01	Pengadaan dan Pengolahan Bahan Pustaka				
	00	Buku induk koleksi	Biasa	Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
	01	Daftar buku terseleksi	Biasa	Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
	02	Daftar pengiriman Bahan Pustaka Surplus	Biasa	Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

NO (1)	JENIS DOKUMEN / ARSIP (2)		KLASIFIKASI KEAMANAN (3)	HAK AKSES (4)	DASAR PERTIMBANGAN (5)	UNIT PENGOLAH (6)
						Rumah Tangga
	03	Lembar kerja pengolahan BP (Buram, Pengkatalogan)	Biasa	Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
	04	Shelt List/ Jajaran Kartu Utama (master list)	Biasa	Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
	05	Daftar tambahan Buku (Assesion list)	Biasa	Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
	06	Daftar/ jajaran kendali (Subyek dan Pengarang)	Biasa	Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
	02	Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi				
	00	Data dan statistik anggota, pengunjung dan peminjaman bahan pustaka	Biasa	Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

NO	JENIS DOKUMEN / ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	01	Pertanyaan Rujukan dan Jawaban	Biasa	Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
	03	Preservasi bahan Pustaka				
	00	Survei kondisi Bahan Pustaka	Biasa	Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
	01	Repografi Bahan Pustaka	Biasa	Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
	04	Pembinaan Perpustakaan	Biasa	Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
XIV	TI	TEKNOLOGI INFORMASI				
	00	Rencana Strategis/master plan Pembangunan Sistem Informasi (SIM)				
	00	Dokumentasi Arsitektur dan implementasi	Terbatas	Direktur Penindakan	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Penindakan
	01	Perekaman dan Pemutakhiran Data	Terbatas	Direktur Penindakan	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Penindakan

NO	JENIS DOKUMEN / ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	02	Migrasi Sistem Aplikasi dan Data	Terbatas	Direktur Penindakan	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Penindakan
	03	Layanan Back-up Data Digital	Terbatas	Direktur Penindakan	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Penindakan
XV	PW	PENGAWASAN				
	00	Rencana Pengawasan				
	00	Rencana Strategis Pengawasan	Biasa	Inspektur	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Inspektorat
	01	Rencana Kerja Tahunan	Biasa	Inspektur	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Inspektorat
	02	Rencana Kinerja Tahunan	Biasa	Inspektur	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Inspektorat
	03	Penetapan Kinerja Tahunan	Biasa	Inspektur	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Inspektorat
	04	Rakor Pengawasan Tingkat Nasional	Biasa	Inspektur	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Inspektorat
	01	Pelaksanaan Pengawasan				
	00	Pengawasan Audit yang memerlukan Tindak Lanjut	Rahasia	Inspektur	menimbulkan kerugian yang serius terhadap kinerja BNPT	Inspektorat

NO	JENIS DOKUMEN / ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	01	Pengawasan Audit Investigasi yang memerlukan Tindak Lanjut	Rahasia	Inspektur	menimbulkan kerugian yang serius terhadap kinerja BNPT	Inspektorat
	02	Pengawasan Audit yang tidak memerlukan Tindak Lanjut	Terbatas	Inspektur	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Inspektorat
	03	Pengawasan Audit Investigasi yang tidak memerlukan Tindak Lanjut	Terbatas	Inspektur	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Inspektorat
	04	Laporan Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat	Terbatas	Inspektur	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Inspektorat
	05	Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan	Terbatas	Inspektur	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Inspektorat
	06	Laporan Perkembangan Barang Milik Negara	Terbatas	Inspektur	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Inspektorat
	07	Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Review Instansi BNPT				
	08	<i>Good Corporate Governance (GCG)</i>	Terbatas	Inspektur	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Inspektorat

NO	JENIS DOKUMEN / ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	09	Pengawasan Internal Bidang Kearsipan	Terbatas	Inspektur	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Inspektorat
B	SUBSTANTIF					
I	PENCEGAHAN TERORISME					
	00	Kebijakan Pencegahan Terorisme	Terbatas	Direktur Pencegahan	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Pencegahan
	01	Pengawasan Aksi Terorisme				
	00	Analisa Pengawasan Terorisme	Terbatas	Direktur Pencegahan	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Pencegahan
	01	Koordinasi Pengawasan Administratif dan Fisik Aksi Terorisme	Terbatas	Direktur Pencegahan	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Pencegahan
	02	Pelaksanaan pengawasan aksi terorisme	Terbatas	Direktur Pencegahan	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Pencegahan
	03	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Terorisme	Terbatas	Direktur Pencegahan	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Pencegahan
	02	Kontra Propaganda Aksi Terorisme				
	00	Analisa Kontra Propaganda Aksi Terorisme	Terbatas	Direktur Pencegahan	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Pencegahan
	01	Koordinasi Kontra Propaganda Aksi Terorisme	Terbatas	Direktur	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat

NO	JENIS DOKUMEN / ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
				Pencegahan	tugas BNPT	Pencegahan
	02	Pelaksanaan Kontra Propaganda Aksi Terorisme	Terbatas	Direktur Pencegahan	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Pencegahan
	03	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kontra Propaganda Aksi Terorisme	Terbatas	Direktur Pencegahan	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Pencegahan
	03	Pemberdayaan Masyarakat				
	00	Analisa Pemberdayaan Masyarakat	Terbatas	Direktur Pencegahan	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Pencegahan
	01	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	Terbatas	Direktur Pencegahan	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Pencegahan
	02	Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat	Terbatas	Direktur Pencegahan	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Pencegahan
	04	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat	Terbatas	Direktur Pencegahan	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Pencegahan
	05	Satuan Tugas Pencegahan Terorisme	Terbatas	Direktur Pencegahan	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Pencegahan
II	PA	PERLINDUNGAN AKSI TERORISME				

NO	JENIS DOKUMEN / ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	00	Kebijakan Perlindungan Terorisme	Terbatas	Direktur Perlindungan	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Perlindungan
	01	Pengamanan Objek Vital dan Transportasi				
	00	Analisa Pengamanan Objek Vital dan Transportasi	Terbatas	Direktur Perlindungan	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Perlindungan
	01	Koordinasi Pengamanan Objek Vital dan Transportasi	Terbatas	Direktur Perlindungan	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Perlindungan
	02	Pelaksanaan Pengamanan Objek Vital dan Transportasi	Terbatas	Direktur Perlindungan	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Perlindungan
	03	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengamanan Objek Vital dan Transportasi	Terbatas	Direktur Perlindungan	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Perlindungan
	02	Pengamanan Lingkungan				
	00	Analisa Pengamanan Lingkungan	Terbatas	Direktur Perlindungan	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Perlindungan

NO	JENIS DOKUMEN / ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	01	Koordinasi Pengamanan Lingkungan Umum dan Pemerintah	Terbatas	Direktur Perlindungan	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Perlindungan
	02	Pelaksanaan Pengamanan Lingkungan Umum dan Pemerintah	Terbatas	Direktur Perlindungan	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Perlindungan
	03	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengamanan Lingkungan Umum dan Pemerintah	Terbatas	Direktur Perlindungan	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Perlindungan
	03	Pemulihan Korban Aksi Terorisme				
	00	Analisa Pemulihan Korban Aksi Terorisme	Terbatas	Direktur Perlindungan	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Perlindungan
	01	Koordinasi Pemulihan Korban Aksi Terorisme	Terbatas	Direktur Perlindungan	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Perlindungan
	02	Pelaksanaan Pemulihan Korban Aksi Terorisme	Terbatas	Direktur Perlindungan	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Perlindungan

NO	JENIS DOKUMEN / ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	03	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemulihan Korban Aksi Terorisme	Terbatas	Direktur Perlindungan	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Perlindungan
	04	Satuan Tugas Perlindungan Terorisme	Terbatas	Direktur Perlindungan	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Perlindungan
III	DT	DERADIKALISASI TERORISME				
	00	Kebijakan Deradikalisasi Terorisme	Terbatas	Direktur Deradikalisasi	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Deradikalisasi
	01	Pembinaan terhadap Lembaga				
	00	Analisa Pembinaan terhadap Lembaga	Terbatas	Direktur Deradikalisasi	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Deradikalisasi
	01	Koordinasi Pembinaan Lembaga	Terbatas	Direktur Deradikalisasi	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Deradikalisasi
	02	Pelaksanaan Pembinaan terhadap Lembaga	Terbatas	Direktur Deradikalisasi	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Deradikalisasi
	03	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan terhadap Lembaga	Terbatas	Direktur Deradikalisasi	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Deradikalisasi
	02	Pembinaan terhadap Masyarakat				

NO	JENIS DOKUMEN / ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	00	Analisa Pembinaan terhadap Masyarakat	Terbatas	Direktur Deradikalisasi	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Deradikalisasi
	01	Koordinasi Pembinaan terhadap Masyarakat	Terbatas	Direktur Deradikalisasi	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Deradikalisasi
	02	Pelaksanaan Pembinaan terhadap Masyarakat	Terbatas	Direktur Deradikalisasi	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Deradikalisasi
	03	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan terhadap Masyarakat	Terbatas	Direktur Deradikalisasi	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Deradikalisasi
	03	Pembinaan terhadap Lembaga Pemasyarakatan Khusus Teroris				
	00	Analisa terhadap Lembaga Pemasyarakatan Khusus Teroris	Terbatas	Direktur Deradikalisasi	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Deradikalisasi
	01	Koordinasi terhadap Lembaga Pemasyarakatan	Terbatas	Direktur Deradikalisasi	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Deradikalisasi
	02	Pelaksanaan Pemulihan Korban Aksi Terorisme	Terbatas	Direktur Deradikalisasi	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Deradikalisasi

NO	JENIS DOKUMEN / ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	03	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan terhadap Lembaga Pemasyarakatan	Terbatas	Direktur Deradikalisasi	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Deradikalisasi
	04	Satuan Tugas Deradikalisasi Terorisme	Terbatas	Direktur Deradikalisasi	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Deradikalisasi
IV	PENINDAKAN TERORISME					
	00	Kebijakan Penindakan Terorisme	Terbatas	Direktur Penindakan	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Penindakan
	01	Intelijen Terorisme				
	00	Analisa Intelijen Terorisme	Rahasia	Direktur Penindakan	menimbulkan kerugian yang serius terhadap kinerja BNPT	Direktorat Penindakan
	01	Koordinasi Intelijen Terorisme	Rahasia	Direktur Penindakan	menimbulkan kerugian yang serius terhadap kinerja BNPT	Direktorat Penindakan
	02	Pelaksanaan Intelijen Terorisme	Rahasia	Direktur Penindakan	menimbulkan kerugian yang serius terhadap kinerja BNPT	Direktorat Penindakan
	03	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Intelijen Terorisme	Rahasia	Direktur Penindakan	menimbulkan kerugian yang serius terhadap kinerja BNPT	Direktorat Penindakan
	02	Pengumpulan dan Pengolahan Data Informasi Kejahatan Terorisme				

NO	JENIS DOKUMEN / ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	00	Analisis Pengumpulan dan Pengolahan Data Terorisme	Rahasia	Direktur Penindakan	menimbulkan kerugian yang serius terhadap kinerja BNPT	Direktorat Penindakan
	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Terorisme	Rahasia	Direktur Penindakan	menimbulkan kerugian yang serius terhadap kinerja BNPT	Direktorat Penindakan
	02	Koordinasi Penanggulangan Teroris di Bidang Teknologi Informasi	Rahasia	Direktur Penindakan	menimbulkan kerugian yang serius terhadap kinerja BNPT	Direktorat Penindakan
	03	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Teknologi Informasi Penanggulangan Terorisme	Rahasia	Direktur Penindakan	menimbulkan kerugian yang serius terhadap kinerja BNPT	Direktorat Penindakan
	03	Kesiapsiagaan dan Pengendalian Krisis Terorisme				
	00	Analisa Kesiapsiagaan dan Pengendalian Krisis Terorisme	Rahasia	Direktur Penindakan	menimbulkan kerugian yang serius terhadap kinerja BNPT	Direktorat Penindakan
	01	Koordinasi Pelaksanaan Kesiapsiagaan dan Pengendalian Krisis Terorisme	Rahasia	Direktur Penindakan	menimbulkan kerugian yang serius terhadap kinerja BNPT	Direktorat Penindakan
	02	Pelaksanaan Kesiapsiagaan dan Pengendalian Krisis Terorisme	Rahasia	Direktur Penindakan	menimbulkan kerugian yang serius terhadap kinerja BNPT	Direktorat Penindakan
	03	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kesiapsiagaan dan Pengendalian Krisis Terorisme	Rahasia	Direktur Penindakan	menimbulkan kerugian yang serius terhadap kinerja BNPT	Direktorat Penindakan

NO	JENIS DOKUMEN / ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	04	Satuan Tugas Penindakan Terorisme	Rahasia	Direktur Penindakan	menimbulkan kerugian yang serius terhadap kinerja BNPT	Direktorat Penindakan
V	PK	PEMBINAAN KEMAMPUAN PENANGGULANGAN TERORISME				
	00	Kebijakan Pembinaan Penanggulangan Terorisme	Terbatas	Direktur Pembinaan Kemampuan	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Pembinaan Kemampuan
	01	Pelatihan Penanggulangan Terorisme				
	00	Analisa Pelatihan Penanggulangan Terorisme	Terbatas	Direktur Pembinaan Kemampuan	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Pembinaan Kemampuan
	01	Koordinasi Pelatihan Penanggulangan Terorisme	Terbatas	Direktur Pembinaan Kemampuan	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Pembinaan Kemampuan
	02	Pelaksanaan Pelatihan Penanggulangan Terorisme	Terbatas	Direktur Pembinaan Kemampuan	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Pembinaan Kemampuan
	03	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelatihan Penanggulangan Terorisme	Terbatas	Direktur Pembinaan Kemampuan	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Pembinaan Kemampuan
	02	Pengembangan Sistem Operasi Terorisme				

NO	JENIS DOKUMEN / ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	00	Analisa Pengumpulan dan Pengolahan Data Terorisme	Terbatas	Direktur Pembinaan Kemampuan	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Pembinaan Kemampuan
	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Terorisme	Terbatas	Direktur Pembinaan Kemampuan	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Pembinaan Kemampuan
	02	Koordinasi Penanggulangan Teroris di Bidang Teknologi Informasi	Terbatas	Direktur Pembinaan Kemampuan	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Pembinaan Kemampuan
	03	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Teknologi Informasi Penanggulangan Terorisme	Terbatas	Direktur Pembinaan Kemampuan	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Pembinaan Kemampuan
	03	Penggunaan Kekuatan Penanggulangan Terorisme				
	00	Analisa Penyiapan Informasi Penanggulangan Terorisme	Terbatas	Direktur Pembinaan Kemampuan	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Pembinaan Kemampuan
	01	Koordinasi Pelaksanaan penggunaan kekuatan penanggulangan terorisme	Terbatas	Direktur Pembinaan Kemampuan	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Pembinaan Kemampuan
	02	Pelaksanaan penggunaan kekuatan penanggulangan terorisme	Terbatas	Direktur Pembinaan Kemampuan	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Pembinaan Kemampuan

NO	JENIS DOKUMEN / ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
				Kemampuan		Kemampuan
	03	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penggunaan Kekuatan Penanggulangan Terorisme	Terbatas	Direktur Pembinaan Kemampuan	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Pembinaan Kemampuan
VI	PH PENEGAKAN HUKUM					
	00	Kebijakan Penegakan Hukum	Terbatas	Direktur Penegakan Hukum	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Penegakan Hukum
	01	Perlindungan Aparat Penegak Hukum				
	00	Analisa Perlindungan Hukum terhadap Aparat Penegak Hukum	Terbatas	Direktorat Penegakan Hukum	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Penegakan Hukum
	01	Koordinasi Perlindungan Hukum terhadap Aparat Penegak Hukum	Terbatas	Direktorat Penegakan Hukum	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Penegakan Hukum
	02	Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Aparat Penegak Hukum	Terbatas	Direktorat Penegakan Hukum	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Penegakan Hukum

NO	JENIS DOKUMEN / ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)
	03	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Aparat Penegak Hukum		Terbatas	Direktorat Penegakan Hukum	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Penegakan Hukum
	02	Hubungan Kerjasama Antar Aparat Penegak Hukum					
	00	Analisa Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga Penegak Hukum		Terbatas	Direktorat Penegakan Hukum	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Penegakan Hukum
	01	Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga Penegak Hukum		Terbatas	Direktorat Penegakan Hukum	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Penegakan Hukum
	02	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga Penegak Hukum		Terbatas	Direktorat Penegakan Hukum	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Penegakan Hukum
	03	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga Penegak Hukum		Terbatas	Direktorat Penegakan Hukum	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Penegakan Hukum
	03	Analisa dan Evaluasi Penegak Hukum					

NO	JENIS DOKUMEN / ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	00 Analisa dan Evaluasi Penegak Hukum Perkara Tindak Pidana Terorisme	Terbatas	Direktorat Penegakan Hukum	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Penegakan Hukum	
	01 Koordinasi Analisa dan Evaluasi Penegak Hukum Perkara Tindak Pidana Terorisme	Terbatas	Direktorat Penegakan Hukum	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Penegakan Hukum	
	02 Pelaksanaan Analisa dan Evaluasi Penegak Hukum Perkara Tindak Pidana Terorisme	Terbatas	Direktorat Penegakan Hukum	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Penegakan Hukum	
	03 Monitoring dan Evaluasi Analisa dan Evaluasi Penegak Hukum Perkara Tindak Pidana Terorisme	Terbatas	Direktorat Penegakan Hukum	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Penegakan Hukum	
VII	KB KERJASAMA BILATERAL					
	00 Kebijakan Kerjasama Bilateral	Terbatas	Direktur Kerjasama Bilateral	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Kerjasama Bilateral	

NO	JENIS DOKUMEN / ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	01	Kerjasama Asia Pasifik, Afrika dan Timur Tengah				
		00 Pelaksanaan dan Pengembangan Kerjasama Kawasan Asia Pasifik, Afrika dan Timur Tengah	Terbatas	Direktur Kerjasama Bilateral	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Kerjasama Bilateral
		01 Pelaksanaan dan Pengembangan Kerjasama Kawasan Asia Pasifik, Afrika dan Timur Tengah	Terbatas	Direktur Kerjasama Bilateral	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Kerjasama Bilateral
		02 Pelaksanaan dan Pengembangan Kerjasama Kawasan Asia Pasifik, Afrika dan Timur Tengah	Terbatas	Direktur Kerjasama Bilateral	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Kerjasama Bilateral
		03 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Kawasan Asia Pasifik, Afrika dan Timur Tengah	Terbatas	Direktur Kerjasama Bilateral	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Kerjasama Bilateral
	02	Kerjasama Amerika dan Eropa				
		00 Analisa Kerjasama Kawasan Amerika dan Eropa	Terbatas	Direktur Kerjasama Bilateral	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Kerjasama Bilateral

NO	JENIS DOKUMEN / ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)
	01	Koordinasi Kerjasama Kawasan Amerika dan Eropa	Terbatas	Direktur Kerjasama Bilateral	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Kerjasama Bilateral	
	02	Pelaksanaan dan Pengembangan Kerjasama Kawasan Amerika dan Eropa	Terbatas	Direktur Kerjasama Bilateral	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Kerjasama Bilateral	
	03	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Kawasan Amerika dan Eropa	Terbatas	Direktur Kerjasama Bilateral	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Kerjasama Bilateral	
VIII	KR KERJASAMA REGIONAL dan MULTILATERAL						
	00	Kebijakan Kerjasama Regional dan Multilateral	Terbatas	Direktur Kerjasama Regional dan Multilateral	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Kerjasama Regional dan Multilateral	
	01	Kerjasama Regional					
	00	Analisa Kerjasama Regional	Terbatas	Direktur Kerjasama Regional dan Multilateral	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Kerjasama Regional dan Multilateral	
	01	Koordinasi Koordinasi Kerjasama Regional	Terbatas	Direktur Kerjasama Regional dan Multilateral	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Kerjasama Regional dan Multilateral	

NO	JENIS DOKUMEN / ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
						Multilateral
	02	Pelaksanaan Koordinasi Kerjasama Regional	Terbatas	Direktur Kerjasama Regional dan Multilateral	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Kerjasama Regional dan Multilateral
	03	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Regional	Terbatas	Direktur Kerjasama Regional dan Multilateral	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Kerjasama Regional dan Multilateral
	02	Kerjasama Multilateral				
	00	Analisa Kerjasama Multilateral	Terbatas	Direktur Kerjasama Regional dan Multilateral	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Kerjasama Regional dan Multilateral
	01	Koordinasi Kerjasama Multilateral	Terbatas	Direktur Kerjasama Regional dan Multilateral	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Kerjasama Regional dan Multilateral
	02	Pelaksanaan Kerjasama Multilateral	Terbatas	Direktur Kerjasama Regional dan Multilateral	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Kerjasama Regional dan Multilateral

NO	JENIS DOKUMEN / ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
		03 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Multilateral	Terbatas	Direktur Kerjasama Regional dan Multilateral	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Kerjasama Regional dan Multilateral
	03	Forum Kerjasama				
		00 Kerjasama Regional	Terbatas	Direktur Kerjasama Regional dan Multilateral	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Kerjasama Regional dan Multilateral
		01 Kerjasama Multilateral	Terbatas	Direktur Kerjasama Regional dan Multilateral	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Kerjasama Regional dan Multilateral
IX	HI	PERANGKAT HUKUM INTERNASIONAL				
	00	Kebijakan Perangkat Hukum Internasional	Rahasia	Direktur Perangkat Hukum Internasional	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Perangkat Hukum Internasional
	01	Konvensi dan Resolusi Internasional				

NO	JENIS DOKUMEN / ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	00 Analisa Konvensi dan Resolusi Internasional	Rahasia	Direktur Perangkat Hukum Internasional	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Perangkat Hukum Internasional	
	01 Koordinasi Konvensi dan Resolusi Internasional	Rahasia	Direktur Perangkat Hukum Internasional	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Perangkat Hukum Internasional	
	02 Pelaksanaan Konvensi dan Resolusi Internasional	Rahasia	Direktur Perangkat Hukum Internasional	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Perangkat Hukum Internasional	
	03 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Konvensi dan Resolusi Internasional Penanggulangan Terorisme	Rahasia	Direktur Perangkat Hukum Internasional	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Perangkat Hukum Internasional	
	02 Perlindungan WNI dan Kepentingan Nasional di Luar Negeri					
	00 Analisa Perlindungan WNI dan Kepentingan Nasional di Luar Negeri	Rahasia	Direktur Perangkat Hukum Internasional	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Perangkat Hukum Internasional	

NO	JENIS DOKUMEN / ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	01	Koordinasi Perlindungan WNI dan Kepentingan Nasional di Luar Negeri	Rahasia	Direktur Perangkat Hukum Internasional	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Perangkat Hukum Internasional
	02	Pelaksanaan Perlindungan WNI dan Kepentingan Nasional di Luar Negeri	Rahasia	Direktur Perangkat Hukum Internasional	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Perangkat Hukum Internasional
	03	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perlindungan WNI dan Kepentingan Nasional di Luar Negeri terhadap Ancaman Terorisme	Rahasia	Direktur Perangkat Hukum Internasional	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Perangkat Hukum Internasional
XII DL	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	PENANGGULANGAN TERORISME				
	00	Perencanaan Pendidikan dan pelatihan	Biasa	Kepala Sub Direktorat Pelatihan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Direktorat Pembinaan Kemampuan
	00	Pedoman-pedoman kediklatan				

NO	JENIS DOKUMEN / ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	01	Kurikulum - kurikulum diklat	Terbatas	Direktur Pembinaan Kemampuan	memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BNPT	Direktorat Pembinaan Kemampuan
	02	Modul-modul diklat	Biasa	Kepala Sub Direktorat Pelatihan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Direktorat Pembinaan Kemampuan
	03	Sistem dan Metode	Biasa	Kepala Sub Direktorat Pelatihan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Direktorat Pembinaan Kemampuan
	04	Panduan fasilitator	Biasa	Kepala Sub Direktorat Pelatihan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Direktorat Pembinaan Kemampuan
	05	saran/rekomendasi penyenggaraan diklat	Biasa	Kepala Sub Direktorat Pelatihan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Direktorat Pembinaan Kemampuan
	06	Notulen Sosialisasi/Rapat Koordinasi Kebijakan Diklat	Biasa	Kepala Sub Direktorat Pelatihan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Direktorat Pembinaan Kemampuan
	01	Pelaksanaan Mutu Pendidikan dan pelatihan				
	00	Akreditasi Lembaga Diklat	Biasa	Kepala Sub Direktorat Pelatihan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Direktorat Pembinaan Kemampuan

NO	JENIS DOKUMEN / ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	01	Sertifikasi sumber daya manusia kediklatan	Biasa	Kepala Sub Direktorat Pelatihan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Direktorat Pembinaan Kemampuan
	02	Sistem Informasi Diklat	Biasa	Kepala Sub Direktorat Pelatihan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Direktorat Pembinaan Kemampuan
	00	Rencana Tahunan Diklat	Biasa	Kepala Sub Direktorat Pelatihan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Direktorat Pembinaan Kemampuan
	01	Rencana Penyelenggaraan Diklat	Biasa	Kepala Sub Direktorat Pelatihan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Direktorat Pembinaan Kemampuan
	02	Rencana Penyusunan Peraturan/Pedoman Diklat	Biasa	Kepala Sub Direktorat Pelatihan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Direktorat Pembinaan Kemampuan
	04	Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan				
	00	Pelaksanaan Diklat	Biasa	Kepala Sub Direktorat Pelatihan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Direktorat Pembinaan Kemampuan
	01	Registrasi Sertifikat STTPP Peserta Diklat	Biasa	Kepala Sub Direktorat Pelatihan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Direktorat Pembinaan Kemampuan

NO (1)	JENIS DOKUMEN / ARSIP (2)		KLASIFIKASI KEAMANAN (3)	HAK AKSES (4)	DASAR PERTIMBANGAN (5)	UNIT PENGOLAH (6)
	02	Laporan Penyelenggaraan Diklat	Biasa	Kepala Sub Direktorat Pelatihan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Direktorat Pembinaan Kemampuan
	03	Evaluasi Penyelenggaraan Diklat	Biasa	Kepala Sub Direktorat Pelatihan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Direktorat Pembinaan Kemampuan
	04	Evaluasi alumni pasca Diklat	Biasa	Kepala Sub Direktorat Pelatihan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BNPT	Direktorat Pembinaan Kemampuan

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME
REPUBLIK INDONESIA,

SUHARDI ALIUS